



KESATUAN AKSI PENANGGULANGAN BENCANA

Tiap Wilayah Diimbau Susun Dokumen RPB

YOGYA (KR) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogya mendorong tiap wilayah mampu menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Hal ini agar ada kesatuan aksi dalam penanggulangan bencana sekaligus memperkuat mitigasi yang ada di wilayah.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogya Nur Hidayat, menjelaskan penyusunan rencana penanggulangan bencana bertujuan terwujudnya pembangunan Kota Yogya yang unggul dan berkelanjutan berbasis pada pengurangan risiko bencana.

"Masing-masing perangkat daerah maupun masing-masing kelompok masyarakat harapannya juga menyusun

suatu rencana penanggulangan secara internal. Dari masing-masing ini dengan berbagai program dan RPB yang ada di Kota Yogya mudah-mudahan ketika terjadi bencana maka penanganannya tidak akan berbeda. Kemudian mampu tertata dengan baik serta menekan risiko yang sekecil-kecilnya baik korban maupun material," ungkapnya, Kamis (7/12).

Dirinya menyebutkan kecenderungan bencana yang dapat terjadi di Kota Yogya antara lain cuaca ekstrem, gempa bumi, kekeringan dan kegagalan teknologi. Berdasarkan isu yang berkembang tersebut telah tersusun beberapa rekomendasi program kegiatan prioritas. Di antaranya penguatan organisasi relawan dan Kampung Tanggap Bencana (KTB) dalam penanggulangan bencana, pengembangan pariwisata tangguh dan penguatan ekonomi masyarakat daerah rawan bencana, mitigasi kejadian luapan air sungai maupun longsor tebing sungai, serta pengembangan sistem

cadangan pangan dalam kondisi darurat bencana.

"Selama ini kan peran perangkat daerah yang belum maksimal. Jadi, dengan tersusunnya RPB akan tercipta kegiatan dan program yang nyata sehingga penanganannya dapat terpola dan terkondisikan dengan baik. Contohnya kalau banjir, untuk kebutuhan yang putri-putri itu bagaimana, kebutuhannya siapa yang menanganinya dan memenuhi, semua sudah jelas," tutur Nur Hidayat.

Sementara Sekda Kota Yogya Ir Aman Yuriadijaya MM, berharap dalam dokumen harus mampu memberikan arah pedoman dalam pe-

rumusan kebijakan dan mengatur pelaku serta penanggung jawab program penanggulangan bencana. Hal itu juga harus tercantum panduan koordinasi bagi multipihak di Kota Yogya.

"Penanggulangan bencana adalah integrasi antar kepentingan sektor dan lembaga, sehingga hal ini menjadi tanggung jawab bersama. RPB harus disimak dan dipahami oleh seluruh sektor, sehingga paham peran masing-masing dan tidak saling menyalahkan satu sama lain jika ada kesalahpahaman antar sektor," urainya.

Aman menyebutkan dalam penanggulangan bencana

bukan sesuatu hal yang mudah, namun harus ada semangat menguatkan ekosistem melalui kolaborasi antar sektor. Menurutnya, dalam kolaborasi multipihak ini membutuhkan chemistry saling memahami dan melengkapi yang kuat. "Kita berada dalam satu ekosistem yang sama. Oleh karenanya kita bicara pelebagaan yaitu proses integrasi antar sektor. Proses bisnis dalam RPB harus dikonstruksikan secara jelas siapa sasaran utama, siapa yang menjadi penanggung jawab utama, pendukung dan manajemen apa yang dilakukan jika terjadi bencana," paparnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 September 2024

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005